

Pemkot Targetkan Raih Opini WTP

Pontianak, BERKAT.

Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam bidang laporan keuangan daerah yang ditunjang dengan pengelolaan aset yang akuntabel dan diyakini kewajarannya serta handal dalam penyajiannya, maka perlu ditingkatkan mutu dan kemampuan aparatur dalam mengelola barang milik daerah khususnya dalam penyajian laporan kekayaan daerah dalam neraca laporan keuangan.

Untuk itu, Pemkot Pontianak, menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemkot Pontianak. Bimtek pengelolaan barang ini diikuti sebanyak 123 peserta yang terdiri dari atasan langsung penyimpan dan pengurus barang, penyimpan barang dan pengurus barang, di salah satu hotel, kemarin.

Wakil Walikota Pontianak, Paryadi mengatakan bimtek ini sangat penting

untuk diikuti karena melalui bimtek inilah para peserta yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah bisa memperoleh informasi-informasi baru, baik itu terkait peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI.

"Saya tekankan lagi bahwa respon kita terhadap sebuah peraturan yang nantinya akan menjadi tolok ukur atau acuan dalam pengelolaan keuangan harus kita sikapi. Jangan nanti kita mengacu pada peraturan-peraturan yang dianggap basi," ujar Paryadi.

Paryadi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Pontianak untuk berupaya dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target opini WTP bisa tercapai. "Saya berharap apa yang menjadi tugas dan

kewajiban para aparatur yang menangani pengelolaan aset di masing-masing SKPD dapat mendukung dan mensukseskan keinginan Pemkot Pontianak untuk meraih opini WTP dalam tahun 2012 nanti," harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah 2 Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Riris Prasetyo mengungkapkan, aset menjadi hal yang penting karena laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) umumnya permasalahan aset menjadi salah satu penyebab kurang baik. "Dalam laporan keuangan daerah, di sana ada neraca dan dalam neraca itu datanya sebagian besar dari laporan barang milik daerah," ungkapnya.

Dia menambahkan, aset pada prinsipnya adalah untuk pelayanan publik. Namun ada satu permasalahan yang seringkali dihadapi yakni aset yang sudah tidak ada di pemerintah daerah tetapi dalam

catatan masih ada. "Dan biasanya aset itu berasal dari tahun 80-an dan 90-an tetapi sampai sekarang catatannya masih ada.

Dan yang lebih tidak enaknyanya lagi keberadaan catatan atau bukti itu sudah dicopy oleh BPK. Jadi, BPK tiap tahun akan tahu bahwa keberadaan aset itu sudah tidak ada tapi di buku kita masih ada," paparnya.

Kemudian permasalahan lainnya terkait aset, lanjut dia, umumnya di pemerintah daerah meskipun struktur organisasi antara bidang aset dan bidang keuangan menjadi satu namun praktiknya bidang-bidang itu pekerjaannya masih terpisah.

Untuk itu, dia berharap pengelolaan aset atau barang milik daerah menjadi lebih baik dan tertib. "Dan tentu saja yang kita harapkan tidak menjadi permasalahan diaudit BPK nanti," harapnya. (wti)